



## TERAS Model Code

**APRESIASI** yang dilayangkan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah, saat meninjau Kampung Lampion Code di Kota Yogyakarta, membawa angin segar sekaligus tantangan besar bagi penataan ruang urban nasional. Di tengah karut-marutnya persoalan kawasan kumuh perkotaan, pengakuan bahwa model Code layak 'diduplikasi secara masif' menegaskan bahwa Yogyakarta berhasil membuktikan kekuatan inovasi lokalnya dalam mengatasi problem tata ruang.

Keberhasilan ini tidak lepas dari filosofi gerakan Mundur, Munggah, Madep Kali (Mundur, Naik, Menghadap Sungai) yang diinisiasi Pemerintah Kota Yogyakarta. Melalui pendekatan ini, bantaran sungai tidak lagi diperlakukan sebagai 'halaman belakang' tempat membuang limbah, tetapi beranda depan yang asri dan produktif. Gagasan Wamen PKP untuk mengintegrasikan konsep rumah panggung modern sebagai bentuk hunian vertikal ramah lingkungan menjadi penguat bahwa penataan kawasan padat penduduk harus berorientasi pada penyediaan ruang publik.

Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, secara realistis mengungkapkan bahwa masih ada pekerjaan sepanjang empat kilometer aliran Code yang belum tersambung dari Sleman hingga Bantul. Menyelesaikan empat titik krusial ini membutuhkan suntikan dana yang tidak sedikit, sekitar Rp56 miliar. Anggaran sebesar itu tentu menjadi ujian bagi komitmen pemerintah pusat: apakah pujian dan rencana menjadikan Code sebagai percontohan nasional akan diikuti dengan dukungan intervensi anggaran yang konkret.

Daya pikat utama dari model Yogyakarta sejatinya terletak pada modal sosialnya, bukan pada kemewahan anggarannya. Keberhasilan menahan 300 ton sampah per hari agar tidak lagi membebani TPA Piyungan, serta program bedah rumah tanpa sepeser pun dana APBD/APBN, adalah buah manis dari kolaborasi berbasis gotong royong. Konsep One Village One Sister University dan One Village One Sister Company yang menggandeng akademisi, korporasi, hingga kekuatan kultural Kraton Yogyakarta, membuktikan bahwa penataan kawasan kumuh adalah kerja kebudayaan multidimensi.

Penataan Sungai Code bisa direplikasi ke kota-kota lain dengan penyesuaian karakteristik daerah masing-masing. Pemerintah pusat harus mengambil peran untuk memastikan integrasi lintas sektor dan pengaman anggaran berjalan simultan. Menjadikan Code sebagai laboratorium nasional penataan sungai perkotaan adalah langkah maju yang mendesak, demi mewujudkan kota-kota Indonesia yang tidak hanya modern secara fisik, tetapi juga memberdayakan warga di dalamnya. \*\*\*

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Walikota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 05 Juli 2026

Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**

NIP. 19690723 199603 1 005